RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN BAGOR

Jalan Pramuka No. 05 Telp. /Fax. (0358) 321702

Kode Pos : 64461

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN BAGOR

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN BAGOR

Jln. Pramuka No. 5 Telepon (0358) 321702 Fax. 321702

BAGOR

Kode Pos : 64461

LEMBAR DISPOSISI

Surat	: Inspektorat	Diterima Tanggal	: 10 Juli 2024
Tanggal Surat	: 5 Juli 2024	Nomor Agenda	: 590
Nomor Surat	: X.500 / 249 / 414.200 / 2024	Diteruskan Kepada :	
Perihal	:	1.Sekcam	
Lap. Hasil Reviu Rankhir Renja Kec Bagor T - 2025		2.Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
		3.Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
		4.Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Pemerintahan Umum	
		5.Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	
		6.Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
		7) Kasubag Umum dan Kepegawaian	

Tindak lanjuti
05/24

Mb Emil tindak lanjuti
10/7/24

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Panglima Sudirman No. 284 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 321196 & 321712 Fax (0358) 321196
Email : inspektorat@nganjukkab.go.id

LAPORAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

Nomor	: X.700/297/411.200/2024
Tanggal	: 5 Juli 2024
Lampiran	: -
Tahun	: 2024

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Rancangan Awal RKPD, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, hal tersebut untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD.

   Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah

2. Sesuai instruksi Bupati Nganjuk, Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk melakukan reviu Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Adapun reviu dilaksanakan pada saat Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 telah selesai disusun.

   Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

   1. Pengujian Kelengkapan Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan Reviu Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah telah lengkap.
   2. Pengujian atas kesesuaian Rumusan Sasaran pada dokumen Rencana Strategis dengan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai.
   3. Pengujian atas Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Renja. Tidak bisa dilakukan pengujian atas yang diperlukan tidak tersedia. Rincian dokumen yang dimaksud akan dijelaskan pada Uraian Hasil Reviu (Angka VII).

4. Pengujian atas Analisis Kesesuaian Kebijakan Nasional dengan Daerah:

   Rumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra, rumusan tujuan dan sasaran dalam Renja tidak sesuai dengan kebijakan nasional mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Pada uraian Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan belum menjelaskan keterkaitan dengan kebijakan nasional.

5. Pengujian atas keselarasan Program dan Kegiatan pada dokumen Rankhir Renja dengan Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang, dapat disimpulkan bahwa tidak sesuai.

6. Pengujian atas penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu. Berdasarkan analisa dokumen disimpulkan bahwa program, kegiatan dan pagu indikatif pada Rankhir Renja belum selaras dengan pagu indikatif pada RKPD.

Kecamatan Bagor telah disarankan untuk melakukan perbaikan atas hasil reviu.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024.

III. TUJUAN REVIU

Tujuan dari dilaksanakannya reviu atas dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, serta kesesuaian dengan perumusan dokumen perencanaan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu adalah pengujian atas penyusunan dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, mencakup pengujian terbatas atas dokumen sumber, namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

V. METODOLOGI REVIU

1. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.
2. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 700/794/411.200/2023 tanggal 1 Juli 2024 mulai tanggal 1 s.d. 5 Juli 2024, dengan susunan tim sebagai berikut :

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Drs. Mokhamad Yasin.,M.Si	19661005 198703 1 010	Inspektur Daerah	Penanggungjawab
2.	Drs. Eko Cahyono, S.Sos, MAP	19670730 199302 1 003	Inpektur Pembantu III	Wakil Penanggungjawab
3.	Rizky Rusmawati,S.STP.,M.Si, CRMO	19850110 200312 2 002	Auditor Madya	Pengendali Teknis
4.	Novarina Dian Wardani,SP	19781123 201001 2 002	Auditor Muda	Ketua Tim
5.	Kartika Ika Wulandari, SE	19940127 202012 2 006	Auditor Pertama	Anggota Tim
6.	Saka Rahardian, ST	19920910 202203 1 003	Calon Auditor Pertama	Anggota Tim
7.	Dina Juanita Tri Santi,A.Md	19960624 202203 2 003	Calon Auditor Pelaksana	Anggota Tim
8.	Agy Wahyu Salindra, A.Md, Ak.	19970611 202203 1 001	Calon Auditor Pelaksana	Anggota Tim

VI. GAMBARAN UMUM

Rancangan dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagian besar telah selaras dengan dokumen Renstra dan Rancangan Akhir RKPD. Adapun tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Rancangan Akhir Renja Kecamatan Bagor Tahun 2025, yaitu :

No	Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan
1	**Tujuan :** Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintah di Kecamatan
2	**Sasaran :** 1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan
3	**Program :**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Derah
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
	Pelakasanaan Urusan Pemerintah Yang Dilimpahkan Kepada Camat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Kelurahan)
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Dearah

VII. URAIAN HASIL REVIU

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengujian kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan Reviu Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah telah lengkap.
   Adapun dokumen yang telah tersedia adalah :
   a. Rencana Strategis Kecamatan Bagor Tahun 2024-2026.
   b. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025.
   c. Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bagor tahun sebelumnya.
   d. Berita Acara Musrenbang Tahun 2025.

e. Berita Acara Forum Perangkat Daerah Kecamatan Bagor Tahun 2025.
f. Laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan Renja Tahun 2025.
g. Berita Acara Verifikasi Rancangan Awal Renja Tahun 2025.

2. Pengujian atas kesesuaian Rumusan Sasaran pada dokumen Rencana Strategis dengan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai

3. Pengujian atas Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Renja. Tidak bisa dilakukan pengujian atas penyusunan substansi antar bab karena dokumen pendukung tidak lengkap. Adapun dokumen yang tidak lengkap diantaranya :

   a. SK Tim Penyusun

   b. Dokumen Orientasi dan Agenda Kerja Tim

   c. Dokumen Pengumpulan Data dan Informasi, diantaranya yang tidak lengkap :

      - Data-data statistik
      - Tabel-tabel/matrik kompilasi data

Rekomendasi :

Camat Bagor untuk selanjutnya supaya memerintahkan kepada Sekretaris dan pejabat yang membidangi untuk melengkapi dokumen yang diperlukan pada reviu Rankhir Renja sehingga tim reviu dapat melakukan pengujian atas penyusunan substansi antar bab.

4. Pengujian atas Analisis Kesesuaian Kebijakan Nasional dengan Daerah :

   Rumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra, rumusan tujuan dan sasaran dalam Renja tidak sesuai dengan kebijakan nasional yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Adapun yang belum sesuai yaitu:

   a. Belum menyajikan hasil evaluasi kinerja pelayanan berupa capaian pelayanan dari IKK dan IKU tahun sebelumnya serta menjelaskan keterkaitan dengan kebijakan nasional.

   b. Telaah terhadap kebijakan nasional belum berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Rekomendasi :

Camat Bagor untuk memerintahkan pejabat yang membidangi agar:

a. Menyajikan capaian pelayanan dari IKK dan IKU dengan diberikan narasi analisis atas hambatan/kendala dan pendukung atas capaian tahun sebelumnya pada bab 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan. Diungkap secara jelas, lengkap serta dapat keterkaitan/kesesuaian dengan kebijakan nasional.
b. Agar telaah terhadap kebijakan nasional berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang sebagaimana sudah di tuangkan dalam RKPD.

5. Pengujian atas keselarasan Program dan Kegiatan pada dokumen Rankhir Renja dengan Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang dapat disimpulkan bahwa belum sesuai dikarenakan pada usulan Musrenbang dijelaskan terdapat anggaran untuk kelurahan dengan rincian tersendiri, sedangkan pada Rancangan Akhir Renja diinput bersamaan dengan anggaran kecamatan.

Rekomendasi :

Camat Bagor untuk selanjutnya memerintahkan pada Sekretaris dan pejabat yang membidangi agar dalam menyusun Rancangan Akhir Renja pada Bab IV, pada Program dan Kegiatan berpedoman dengan RKPD yaitu Program dan Kegiatan Kecamatan Bagor, Program dan Kegiatan Kelurahan Kedondong dan anggaran Kelurahan Guyangan.

6. Pengujian atas penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu. Berdasarkan analisa dokumen disimpulkan bahwa program, kegiatan dan pagu indikatif pada Rankhir Renja telah selaras dengan pagu indikatif pada RKPD. Adapun program dan kegiatan yang belum selaras diantaranya :

No	Program	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Sesuai RKPD	Keterangan
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.565.233.697,00**	**4.154.084.111,00**	Melebihi pagu RKPD sebesar Rp411.149.586,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.261.553.931,00	3.215.023.931,00	Melebihi pagu RKPD sebesar Rp46.530.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.357.900,00	153.386.300,00	Melebihi pagu RKPD sebesar Rp84.971.600,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	367.506.128,00	153.386.300,00	Melebihi pagu RKPD sebesar Rp214.119.828,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	378.122.000,00	205.396.000,00	Melebihi pagu RKPD sebesar Rp172.726.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Derah	222.436.600,00	174.627.000,00	Melebihi pagu RKPD sebesar Rp47.809.600,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**828.570.341,00**	**118.925.000,00**	Rp709.645.341,00 merupakan dana untuk kelurahan
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Kelurahan)	709.645.341,00		Rp709.645.341,00 merupakan dana untuk kelurahan

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	**363.803.115,00**	**78.070.000,00**	Melebihi pagu RKPD sebesar Rp285.733.115,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Dearah	363.803.115,00	78.070.000,00	Melebihi pagu RKPD sebesar Rp285.733.115,00

Rekomendasi :

Camat Bagor untuk :

1. Berkoordinasi dengan Bappeda atas pagu indikatif pada program dan kegiatan yang tidak selaras dengan dokumen RKPD.
2. Selanjutnya dalam menyusun pagu indikatif pada rankhir Renja supaya memperhatikan pagu indikatif pada dokumen RKPD.

VIII. APRESIASI

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari Tim Penyusun Rancangan Akhir Renja Kecamatan Bagor atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga kegiatan Reviu Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010

BERITA ACARA
DESK VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

Pada hari Ini ,tanggal Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat ( ) telah dilaksanakan desk verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bagor dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Sistematika Renja Perangkat Daerah	Substansi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah	Rekomendasi Penyempurnaan
1.	Bab I Pendahuluan		
	a. Latar belakang	Dokumen rancangan akhir Perangkat Daerah telah menyajikan latar belakang terkait Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025	Tebh sesuai
	b. Landasan hukum	Telah menyajikan landasan hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Mohon disesuaikan dengan peraturan yg tebh di tetapkan
	c. Maksud dan tujuan.	Telah menyajikan maksud dan tujuan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tebh sesuai
	d. Sistematika penulisan	Telah menyajikan sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Telah sesuai
2.	Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		

No.	Sistematika Renja Perangkat Daerah	Substansi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah	Rekomendasi Penyempurnaan
	a. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Telah menyajikan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Form bab evaluasi telah sesuai -) Menambahkan kolom IKU dan IKK
	b. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah	Menyajikan analisis realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	- Menambahkan kolom IKU dan IKK Tahun 2024 beserta realisasi bila ada
	c. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk	Menyajikan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	Sudah sesuai hanya mohon untuk visi disesuaikan RPD kab. Nganjuk
	d. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	Menyajikan perbandingan antara rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan	Telah sesuai
	e. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat	Menyajikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan pembangunan	Telah sesuai
3.	Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah		
	a. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah	Telah mencantumkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah	Telah sesuai, terkait pencapaian visi misi disesuaikan dg RPD

No.	Sistematika Renja Perangkat Daerah	Substansi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah	Rekomendasi Penyempurnaan
	b. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Menyajikan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang relevan dengan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah guna pencapaian target kinerja tahun berkenaan dan sesuai dengan print out SIPD	Telah menyajikan print out SIPD
4.	Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	Menyajikan prioritas pembangunan daerah, sasaran perangkat daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026	Menyesuaikan tema RKPD 2025
4.	Penutup	Telah menyajikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Untuk diperbaiki penulisan Tahun

Nganjuk, Juli 2024

Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
SULASTRI	Perwakilan Perangkat Daerah	
Dian.k	Perwakilan Bappeda	

BERITA ACARA
VERIFIKASI RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025
Nomor : 050/ /411.401/2024

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (2-1-2024)** telah dilakukan verifikasi Rancangan Awal Renja Kecamatan BAGOR ..... Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Kabupaten Nganjuk dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Catatan Verifikasi
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan penyusunan agenda kerja.	Keputusan Bupati Nganjuk Nomor tentang Pembentuan Tim Penyusun Renja (Nomenklatur Perangkat Daerah) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025
2.	Pengolahan data dan informasi.	
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.	
4.	Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.	
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD.	
7.	Penelaahan usulan masyarakat.	
8.	Perumusan tujuan dan sasaran.	
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	
10.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.	
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.	
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan	

Scanned with CamScanner

No.	Jenis Kegiatan	Catatan Verifikasi
	kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai Surat Edaran Bupati.	
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah.	
13.	Pendanaan dan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah telah disahkan.	

Catatan verifikasi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025:

- Memperbaiki isu permasalahan
- Memperbaiki tabel 3.1 tujuan dan sasaran
- Menambahkan realisasi IKK dan IKU
- Memperbaiki tabel 4.1
- Memperbaiki tabel 4.2
- Memperbaiki tabel 4.3

Nganjuk, 2 Januari 2024

Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
Sulastri, S.Sos	PERWAKILAN PERANGKAT DAERAH	
	VERIFIKATOR BAPPEDA	
	KEPALA BIDANG RENDALEV/PPM/PSDAIK	

Scanned with CamScanner

LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL REVIU RANCANGAN RENJA PD TAHUN 2025 OLEH APIP

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BAGOR

No	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		HALAMAN	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1.	Melengkapi Dokumen SK TIM Penyusun, Dokumen Orientasi dan Agenda Kerja Tim, Pengumpulan Data dan Informasi	√	-	Lampiran	Telah Melengkapi Dokumen SK TIM Penyusun, Dokumen Orientasi dan Agenda Kerja Tim, Pengumpulan Data dan Informasi
2.	Menyajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta Indikator Kinerja Utama (IKU) periode yang sebelumnya pada BAB II Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Tahun Lalu Sub Bab 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.	√	-	23-28	Telah menambahkan IKK dan IKU periode yang sebelumnya (2018-2023)
3.	Menyusun Rancangan Akhir Renja pada Bab IV pada Program dan Kegiatan berpedoman dengan RKPD yaitu Program dan Kegiatan Kecamatan Bagor, Program dan Kegiatan Kelurahan Kedondong, Program dan Kegiatan Kelurahan Guyangan	√	-	64-75	Telah Menyusun Rancangan Akhir Renja pada Bab IV pada Program dan Kegiatan berpedoman dengan RKPD yaitu Program dan Kegiatan Kecamatan Bagor, Kelurahan Kedondong, Kelurahan Guyangan
4.	Menyusun pagu Indikatif pada Rankir Renja supaya memperhatikan Pagu Indikatif dokumen RKPD	√	-	64-75	Telah Menyusun pagu Indikatif pada Rankir Renja supaya memperhatikan Pagu Indikatif dokumen RKPD

CAMAT BAGOR

SUWARNO, SE, MM
PembinaTk I
Nip. 196901115 199803 1 006

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(3) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
   Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan;
b. BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
   Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;

c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan program dan kegiatan;

d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Memuat kebijakan umum rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan

e. BAB V : PENUTUP

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen Rencana Kerja dari:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Tenaga Kerja;
j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
u. Dinas Pertanian;
v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
aa. Badan Pendapatan Daerah;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Inspektorat Daerah;
dd. Kecamatan Bagor;
ee. Kecamatan Baron;
ff. Kecamatan Berbek;
gg. Kecamatan Gondang;
hh. Kecamatan Jatikalen;
ii. Kecamatan Kertosono;
jj. Kecamatan Lengkong;
kk. Kecamatan Loceret;
ll. Kecamatan Nganjuk;
mm. Kecamatan Ngetos;
nn. Kecamatan Ngluyu;

oo. Kecamatan Ngronggot;
pp. Kecamatan Pace;
qq. Kecamatan Patianrowo;
rr. Kecamatan Prambon;
ss. Kecamatan Rejoso;
tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom;
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

RENCANA KERJA KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

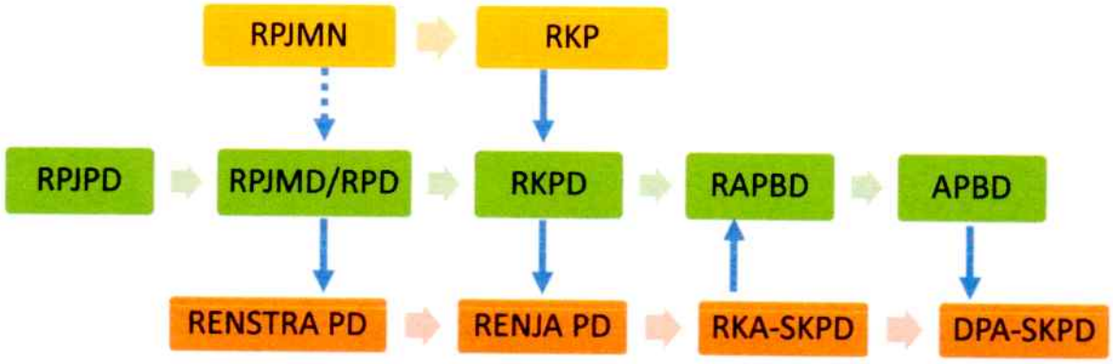
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), serta Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:
- diperhatikan
- dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerahdigunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaankebutuhan anggaran atau

pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Merumuskan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
b. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, pagu indikatif,serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2025;
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025; dan
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan

2.5. PenelaahanUsulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuandan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan

3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melaluicapain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RPD Kabupaten Nganjuk, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2024 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2024, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

(Target BerdasarkanPerubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026)

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	01			**KECAMATAN**									
7	01	01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**			12 Bulan	12 Bulan	98%	12 Bulan	12 Bulan	98%
7	01	01	2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7 01	01	2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang	-	35 Orang/bulan	33 Orang/bulan	94,28%	35 Orang/bulan	33 Orang/bulan	94,28%
	7 01	01	2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi**			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

					Kepegawaian Perangkat Daerah							
701	01	2.05.2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 orang		1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %
701	01	2.05.9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40 Orang		35 orang	33 orang	94,28 %	35 orang	33 orang	94,28 %
701	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
701	01	2.06.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket		1 Paket	1 Paket	99%	1 Paket	1 Paket	99%
701	01	2.06.4		Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket		1 Paket	1 Paket	98%	1 Paket	1 Paket	98%
701	01	2.06.5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket		1 Paket	1 Paket	98%	1 Paket	1 Paket	98%
701	01	2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
701	01	2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	4 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	98,5%	2 Laporan	2 Laporan	98,5%

					Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
7	**01**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-		12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	-
7.01	01	2.07	06	*Pengadaan Mebel*	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			3 Unit	2 Unit	80%	3 Unit	2 Unit	80%
7.01	01	2.07	07	*Pengadaan Peralatan dan Mesin*	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit		4 unit	4 unit	100%	4 unit	4 unit	100%
7.01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
7.01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	98%	1 Laporan	1 Laporan	98%
7.01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan		2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
7.01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang**			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

				Daerah	**Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
7.01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
7.01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		5 unit	5 unit	99%	5 unit	5 unit	99%
7.01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		2 Unit	2 Unit	98%	2 Unit	2 Unit	98%
7.01	01	02		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				12 Bulan	12 Bulan	98%	12 Bulan	12 Bulan	98%
7.01	02.2.02			**Penyelenggaraan Ururan Pemerintahan yang Dilaksanakan oleh Unit Kerja Pernngkat Daerah yang Ada di Kevamamatan**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
7.01	02.2.02.03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Dokumen		1 Laporan	1 Laporan	99%	1 Laporan	1 Laporan	99%

7.002 1	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terlaksanya Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
7.002 1	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	94%	1 Laporan	1 Laporan	94%
701	03		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**			12 bulan	12 bulan	98%	12 bulan	12 bulan	98%
701	**03**	**2.01**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayan Desa**	**Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
701	03	2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat daam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Maysrakat		98%	98%	97%	98%	98%	97%
701	03	2.01.02	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintahan dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	97%	3 Dokumen	3 Dokumen	97%
701	04		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**			12 Bulan	12 Bulan	98%	100%	100%	98%

					yang dilaksanakan								
701	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%
701	04	2.01.01		Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	96%	3 Laporan	3 Laporan	96%
7.01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE KEGIATAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN**			12 Bulan	12 Bulan	98%	12 Bulan	12 Bulan	98%
701	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
701	05	2.01.01		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kutuhan Negara Kesatuan Republik	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	42 Orang		98%	98%	96%	98%	98%	96%

				Indonesia									
7		01	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE KEGIATAN FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			12 Bulan	12 Bulan	98%	12 Bulan	12 Bulan	98%
7	01	06	2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
7	01	06	2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen		28 Dokumen	28 Dokumen	99%	28 Dokumen	28 Dokumen	99%
7	01	06	2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4 Dokumen		28 Dokumen	28 Dokumen	99%	28 Dokumen	28 Dokumen	99%
7	01	03		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**					98%			
7.01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bagor	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 Unit		3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
7.01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bagor	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Unit		3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100%	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100%
7.01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Warujayeng	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
7.0	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan	5 Pokmas /		4 Pokmas/	3 Pokmas / Ormas	100%	4 Pokmas/ Ormas	3 Pokmas / Ormas	100%

			Warujayeng	Masyarakat di Kelurahan	Ormas		Ormas					

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang per lu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran.

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98%	Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pada Anggaran Gaji ASN di Optimalkan sedangkan realitas ASN Kecamatan Tanjunganom belum optimal, penyerapan pada kegiatan rutin sesuai dengan Anggaran Kas yang dibuat.	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Mengoptimalkan pencairan dana rutin kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	98 %	Tinggi

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Rencana Anggaran Kas masuk pada Triwulan ke III	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Menambah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa/Kelurahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	98 %	Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Belum adanya kegiatan Rapat Pleno PKK Kecamatan	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Menambah Kegiatan Pleno secara rutin
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	98 %	Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Rencana Anggaran Kas masuk pada Triwulan ke III	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Menambah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa/Kelurahan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	98 %	Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Terjadinya Perubahan RKPDuntuk kegiatan pembinaan Desa/Kelurahan	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Menambah Kegiatan Pembinaan Desa / Kelurahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	98 %	Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Terjadinya Perubahan RKPDuntuk kegiatan Paskibraka	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Menambah Kegiatan Pelatihan paskibraka Kecamatan

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98 %	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Adanya Peraturan Baru PMK 212 yang mengatur tentang Anggaran bagi Kelurahan	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Melakukan koordinasi secara rutin dengan Bagian Anggaran BPKAD

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sertaIndikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama (core bussiness) dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bagor
Kabupaten Nganjuk

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian dan surat menyurat				900	1200	1500	1800	1920	828	1164 surat	1410 Surat	1728 surat	874 surat	92 %	97 %	94 %	96 %	45,52 %
2	Jumlah koordinasi bidang ketertiban dan keamanan yang dilaksanakan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Jumlah desa/kelurahan yang menyusun buku profil desa/kelurahan				21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disususun tepat waktu				3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Jumlah peserta musrenbang kecamatan yang hadir				115	115	115	115	115	104	102	110	112	107	91 %	89 %	96 %	98 %	93,04 %
7.	Jumlah pelayanan legalisasi surat menyurat dan pelayanan kependudukan (KTP, KK, Surat Pindah Keluar dan Masuk)				1500	1620	1680	1800	2100	1380	1458	1545	1692	952	92 %	90 %	92 %	94 %	45,33 %

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Bagor menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD yaitu tahun 2019 sampai tahun 2023. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun.

Indikator Kinerja Kecamatan Bagor yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Bagor terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu: Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.

Adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Bagor adalah " Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bagor

No	Indikator	Target	Realisasi 2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	Baik	86.66

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK)berfungsi untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Kecamatan Bagor adalah :

1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
2. Prosentase sarana/prasarana layak fungsi.
3. Tingkat kehadiran ASN.
4. Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan ikhtisar laporan keuangan, dokumen perencanaan, dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun.

5. Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang penguasaan bahasa, etiket pelayanan, pengelolaan keuangan, dan pengadaan barang/jasa pemerintah.
6. Prosentase hasil koordinasi di bidang pemerintahan, trantib, kesra, sarpras, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Tingkat Efektifitas Pembinaan Pemerintah Desa.

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Bagor

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian
1	2	4	5	6
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	86	84,60	98%
Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	95	100	105%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase Desa/Kelurahan yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	95	62	65%

Sumber : LKJIP 2023

Tabel 2.7 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis Keberhaslan/Kegagalan Capaian Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Tercapai/Tidak Tercapai
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan.	98	Tercapai : Karena Kepuasan Masyarakat terhadap pelaynan publik masih kurang.
Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban.	Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti.	105	Tercapai : Karena Tingkat Koordinasi Lingkup Kecamatan Bagor baik Internal dan Ekternal sangat bagus.
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.	Prosentase Desa/Kelurahan yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.	65	Tidak Tercapai : Karena Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.

Sumber : LKJIP Tahun 2023 Kecamatan Bagor

Berdasarkan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Dengan Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu kepada masyarakat serta Meningkatkan penyelenggaran pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan, Kecamatan Bagor dituntut

untuk memberikan penjaminan mutu terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan.

Dari indikator kinerja untuk mencapai sasaran Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas. Namun masih ada beberapa kegiatan untuk mendukung program dalam rangka mencapai sasaran hal ini perlu dinventarisasi dan dievaluasi secara terus menerus apa yang menyebabkan capaian kinerja kurang maksimal.

Pada desa-desa yang ada pada Kecamatan Bagor sumber daya aparat relatif masih kurang dan/atau kurang mempunyai kemauan untuk membekali diri dengan kemampuan dalam mengelola administrasi desa. Untuk itu diperlukan penyelenggaraan kegiatan pembinaan administrasi desa untuk membimbing perangkat desa sesuai bidang tugasnya secara berkala.

2.2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.

Adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Bagor adalah "Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan"

Tabel 2.8 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bagor

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
		2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	86.66	78	80	82	82

2.2.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi untuk membantu organisasi perangkat Daetrah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan –tujuan OPD.

Tabel 2.9 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Bagor

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
		2022	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	86	88	89	90	90
2.	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	85	88	90	92	92

2.3. Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bagor telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan Bagor, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat.

Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.* Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur

5). *Peningkatan* Tata *Kelola Pemerintahan Desa yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.*

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Bagordapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik
- Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak
- Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Terlaksanaanya pembinaan pemerintahan, kelembagaan, dan masyarakat

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapai dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tabel 2.10 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	• Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarkat terhadap pelayanan public masih kurang	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kurangnya wawasan dan pengetahuan personil dalam manajemen pelayanan publik
		• Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan,pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		• Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

Sumber : Renstra 2024-2026

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025. Tema RKPD 2025 **"Peningkatan Produktivisitas Ekonomi Lokal dan Reformas Struktural".** Prioritas RKPD 2025

1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berbasis sector potensial Pertanian, dan pengembangan perdagangan- industry yang diprioritaskan berbahan baku hasil pertanian) ➔ Regulasi dan sarpras pendukung ekonomi (Reformasi Struktural);
2. Mendorong Berkembangnya Sektor Strategis (Usaha Mikro, Koperasi, Industri Kreatif, Pariwisata dll)

3. Pemantapan SDM Berdayasaing melalui peningkatan akses dan kualitas kesehatan, Pendidikan Berkarakter.
4. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran serta pemenuhan kebutuhan social dasar.
5. Pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata pendorong konektivitas antar wilayah dan aktivitas perekonomian.
6. Tatakelola Pemerintah yang bersih dan inovasi dan digitalisasi Pelayanan Publik
7. Nilai-nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman dan keamanan sebagai pendukung investasi daerah.

2.3.3. Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

1) Tantangan

a. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
b. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Bagorharus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
c. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
d. TuntutanPemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal (*Good Governance*)
e. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari kawasan perkotaan, dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualisme.
f. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pelayanan pemerintah
g. Income perkapita masyarakat masih rendah.
h. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.

i. Kurang maksimalnya pengelolaan lingkungan khususnya minimnya gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Bagor.

2) Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Bagordalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Bagoruntuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
c. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Bagordalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Bagor;
e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
f. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Bagor, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Bagor;
g. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;

h. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Bagor. Seperti Dana Alokasi Desa (ADD)dan Dana Desa;
i. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Bagor. Seperti PKH/BLT dan Jalin Matra dan Penurunan Angka Stunting.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses reviu rancangan awal RKPD Tahun 2025 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.11
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

a. Kecamatan Bagor

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Bagor**	**NILAI SAKIP KECAMATAN**	**80 Nilai**	**3.558.371.700**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Bagor**	**NILAI SAKIP KECAMATAN**	**80 Nilai**	**4.154.084.111**	**Kec bagor**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangat Daerah	**Bagor**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**4 Laporan**	**2.228.900**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangat Daerah**	**Bagor**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**4 Laporan**	**8.668.000**	**Bagor**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bagor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.228.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bagor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	8.668.000	Bagor
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Bagor**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3 Dokumen**	**3.235.182.800**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bagor**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3 Dokumen**	**3.215.023.931**	**Bagor**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bagor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang	3.230.725.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bagor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang	3.209.187.931	Bagor
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Bagor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	1 Laporan	2.228.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Bagor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	1 Laporan	2.918.000	Bagor

	SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Tahun SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Bagor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	2.228.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Bagor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	6 Laporan	2.918.000	Bagor
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Bagor**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**53.326.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Bagor**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**88.589.138**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bagor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket	29.646.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bagor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	20.940.738	Bagor
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bagor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	23.680.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bagor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	67.648.400	Bagor
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Bagor**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5 Dokumen**	**122.481.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bagor**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6 Dokumen**	**153.386.300**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bagor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.960.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bagor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.111.600	Bagor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bagor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	56.914.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bagor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	89.779.700	Bagor

	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Bagor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.043.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Bagor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.500.000	Bagor
	Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bagor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bagor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.400.000	Bagor
	Penyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	17.164.000	Penyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	43.595.000	Bagor
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bagor	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	19.800.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bagor	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Bagor
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Bagor**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**55 Unit**	**300.795.128**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bagor**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**55 Unit**	**308.393.742**	**Bagor**
	Pengadaan Mebel	Bagor	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	50 Unit	107.553.450	Pengadaan Mebel	Bagor	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	50 Unit	107.553.450	Bagor
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Bagor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	5 Unit	131.494.513	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Bagor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	5 Unit	134.129.292	Bagor
	-	-	-	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bagor	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	66.711.000	Bagor
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Bagor**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**330.992.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bagor**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**205.396.000**	**Bagor**

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa SUrat Menyurat	Bagor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	Bagor
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bagor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	51.028.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bagor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	51.028.000	Bagor
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bagor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	151.368.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bagor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	6 Laporan	151.368.000	Bagor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Bagor**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**47 Unit**	**204.274.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bagor**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**47 Unit**	**174.627.000**	**Bagor**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan	Bagor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	50.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan	Bagor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	63.746.500	Bagor
	Pemeliharaan mebel	Bagor	Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit	9.000.000	Pemeliharaan mebel	Bagor	Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit	14.750.000	Bagor
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	26.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	20 Unit	24.960.000	Bagor
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bagor	Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	118.774.000	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bagor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya YangDipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	71.170.500	Bagor
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Bagor**	**PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN**	**95 %**	**149.178.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN**	**Bagor**	**PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**95 %**	**135.475.000**	**Bagor**

			PUBLIK YANG DILAKSANAKAN DENGAN TERTIB			**PUBLIK**		**YANG DILAKSANAKAN DENGAN TERTIB**			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Bagor**	**Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pem di Tingkat Kecamatan**	**6 Laporan**	**98.834.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Bagor**	**Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**6 Laporan**	**52.375.000**	**Bagor**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Bagor	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	98.834.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Bagor	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	52.375.000	Bagor
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Bagor**	**Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**4 Dokumen**	**7.220.000**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Bagor**	**Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**4 Dokumen**	**19.800.000**	**Bagor**
	Koordinasi / Sinergi Dengan perangkat daerah dan / Instansi Vertikal yang terkait dala pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum	Bagor	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	7.220.000	Koordinasi / Sinergi Dengan perangkat daerah dan / Instansi Vertikal yang terkait dala pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum	Bagor	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	19.800.000	Bagor
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Bagor**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	**12 Laporan**	**43.124.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Bagor**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	**12 Laporan**	**63.300.000**	**Bagor**

			FORKOPIMCAM SERTA TOGA/TOMAS					**SERTA TOGA/TOMAS**			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Bagor**	**Jumlah laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**4 Laporan**	**21.500.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Bagor**	**Jumlah laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**4 Laporan**	**62.725.000**	**Bagor**
	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Bagor	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	21.500.000	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Bagor	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	62.725.000	Bagor
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Bagor**	**PERSENTASE LEMBAGA/ORGANISASI MASYARAKAT YANG AKTIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN**	**21 Orang**	**29.137.800**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Bagor**	**PERSENTASE LEMBAGA/ORGANISASI MASYARAKAT YANG AKTIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN**	**95%**	**133.583.000**	**Bagor**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Bagor**	**Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**	**21 Orang**	**29.137.800**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Bagor**	**Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**	**21 Lembaga Kemasyarakatan**	**133.583.000**	**Bagor**

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Bagor	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21 Orang	29.137.800	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Bagor	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21 Orang	133.583.000	Bagor
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Bagor**	**PERSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG**	**95%**	**43.900.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Bagor**	**PERSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG**	**95 %**	**78.070.000**	**Bagor**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	**Bagor**	**Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**21 Desa/Kelurahan**	**43.900.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah**	**Bagor**	**Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**21 Desa/Kelurahan**	**78.070.000**	**Bagor**
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Bagor	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19 Dokumen	27.650.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Bagor	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21 Dokumen	40.770.000	Bagor

	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Bagor	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	19 Dokumen	16.250.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Bagor	Jumlah kegitan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	21 Dokumen	37.300.000	Bagor

Sumber: Hasil Analisis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

b. Kelurahan Kedondong

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Bagor**	**NILAI SAKIP KECAMATAN**	**80 Nilai**	**191.697.718**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Bagor**	**NILAI SAKIP KECAMATAN**	**80 Nilai**	**191.697.718**	**Kec bagor**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Bagor**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3 Dokumen**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bagor**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3 Dokumen**		**Bagor**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Ppengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kedon dong	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	23.265.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Ppengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kedon dong	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	23.265.000	Kedond ong
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Bagor**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6 Dokumen**	**42.490.700**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bagor**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6 Dokumen**	**42.490.700**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kedon dong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.093.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bagor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.093.500	Kddng
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kedon dong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.889.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kedon dong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.889.700	Kedond ong
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Kedon dong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.507.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Kedon dong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.507.500	Kedond ong
	Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kedon dong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kedon dong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000	Kedond ong

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Bagor**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2 Unit**	**23.759.218**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bagor**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2 Unit**	**23.759.218**	**Bagor**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Kedon dong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	2 Unit	23.759.218	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Kedon dong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	2 Unit	23.759.218	Kedond ong
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Bagor**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**80.178.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bagor**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**80.178.000**	**Bagor**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kedon dong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3.630.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kedon dong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3.630.000	Kedond ong
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kedon dong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	76.548.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kedon dong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	76.548.000	Kedond ong
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Bagor**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**47 Unit**	**22.004.800**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bagor**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**47 Unit**	**22.004.800**	**Bagor**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan	Kedon dong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	7.204.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan	Kedon dong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	7.204.800	Kedond ong
	Pemeliharaan mebel	Kedon dong	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1.800.000	Pemeliharaan mebel	Kedon dong	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1.800.000	Kedond ong
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kedon	Jumlah Peralatan dan Mesin	4 Unit	3.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kedon	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	3.000.000	Kedond

		dong	Lainnya yang Dipelihara			Lainnya	dong	yangDipelihara			ong
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kedon dong	Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kedon dong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya YangDipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	Kedond ong
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Bagor**	**PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BAGOR**	**95%**	**118.925.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Bagor**	**PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BAGOR**	**95%**	**118.925.000**	**Bagor**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kelurahan**	**Jumlah Kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan**	**95%**	**359.990.790**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kelurahan**	**Jumlah Kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan**	**95%**	**359.990.790**	**Kelurahan**
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kedon dong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	331.785.290	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kedon dong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	331.785.290	Kedond ong
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kedon dong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Unit	28.205.500	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kedon dong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Unit	28.205.500	Kedond ong
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Bagor**	**PERSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG**	**95 %**	**78.070.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Bagor**	**PERSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG**	**95 %**	**151.379.553**	**Bagor**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	**Bagor**	**Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**21 Desa/Kelurahan**	**78.070.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan**	**Bagor**	**Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**21 Desa/Kelurahan**	**151.379.553**	**Bagor**

						Daerah					
	Fasilitasi pelaksanaan tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kedon dong	Jumlah Dokumen Fasilitasi pelaksanaan tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	151.379.553	Fasilitasi pelaksanaan tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kedon dong	Jumlah Dokumen Fasilitasi pelaksanaan tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	151.379.553	Kedond ong

Sumber: Hasil Analisis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

c. Kelurahan Guyangan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Bagor**	**NILAI SAKIP KECAMATAN**	**80 Nilai**	**3.558.371.700**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Bagor**	**NILAI SAKIP KECAMATAN**	**80 Nilai**	**219.461.868**	**Kec bagor**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Bagor**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3 Dokumen**	**3.235.182.800**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bagor**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3 Dokumen**	**23.265.000**	**Bagor**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Ppengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Guyangan	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	23.265.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Ppengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kedondong	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	23.265.000	Guyangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Bagor**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5 Dokumen**	**122.481.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bagor**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3 Dokumen**	**42.480.900**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Guyangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.093.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bagor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.093.500	Gyngn
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Guyangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.889.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Guyangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.879.900	Guyangan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Guyangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.507.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Guyangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.507.500	Guyangan
	Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	Guyangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	Guyangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000	Guyangan

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Bagor**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**55 Unit**	**300.795.128**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bagor**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**55 Unit**	**35.353.188**	**Bagor**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Guyangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	5 Unit	35.353.168	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Guyangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	5 Unit	35.353.168	Guyangan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Bagor**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**330.992.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bagor**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**92.548.000**	**Bagor**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Guyangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Guyangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	16.000.000	Guyangan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Guyangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	76.548.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Guyangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	76.548.000	Guyangan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Bagor**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**47 Unit**	**204.274.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bagor**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**47 Unit**	**25.804.800**	**Bagor**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan	Guyangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	7.204.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan	Guyangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	7.204.800	Guyangan
	Pemeliharaan mebel	Gyngn	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	1.500.000	Pemeliharaan mebel	Gyngn	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1.500.000	Gyngn
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Guyangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	4 Unit	3.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Guyangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	1 Unit	2.100.000	Guyangan

			Dipelihara								
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Guyangan	Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Guyangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya YangDipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	Guyangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Bagor**	**PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BAGOR**	**95 %**	**47.664.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Bagor**	**PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BAGOR**	**95%**	**349.654.551**	**Bagor**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kelurahan**	**Jumlah Kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan**	**95%**	**700.000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kelurahan**	**Jumlah Kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan**	**95%**	**349.654.551**	**Kelurahan**
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Guyangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Pokmas/ Ormas		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Guyangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	321.536.151	Guyangan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Guyangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	28.118.400	Guyangan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Bagor**	**PERSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG**	**95%**	**43.900.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Bagor**	**PERSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG**	**95 %**	**134.353.562**	**Bagor**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	**Bagor**	**Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**21 Desa/Kelurahan**	**43.900.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah**	**Bagor**	**Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**21 Desa/Kelurahan**	**134.353.562**	**Bagor**

	Fasilitasi pelaksanaan tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Guyan gan	Jumlah Dokumen Fasilitasi pelaksanaan tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 Dokumen	99.908.000	Fasilitasi pelaksanaan tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Guyan gan	Jumlah Dokumen Fasilitasi pelaksanaan tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	134.353.562	Guyang an

Sumber: Hasil Analisis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari akademisi, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi, serta keterwakilan Desa dan/atau Kelurahanyang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.11
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2024

Tabel 3.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
					2025
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(8)*
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	-	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai	80
		Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Nilai	89
		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	%	90

Sumber : Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Deskripsi kerangka logis tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, cascading dan/atau crosscutting kinerja antar Unit Perangkat Daerah (Program Perangkat Daerah), serta peta proses bisnis pencapaian tujuan Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

Tabel 3.2
Sasaran Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2025)	Alokasi (2025)	
				Program	Pagu Indikatif
KECAMATAN					**4.682.862.111**
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	89	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.154.084.111
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	135.475.000
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	118.925.000
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	78.070.000
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	90	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	62.725.000
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	133.583.000

Tabel 3.3
Sasaran Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2025)	Alokasi (2025)	
				Program	Pagu Indikatif
KELURAHAN KEDONDONG					**703.068.061**
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	89	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	191.697.718
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	359.990.790
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	151.379.553
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	90	-	-

Tabel 3.4
Sasaran Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2025)	Alokasi (2025)	
				Program	Pagu Indikatif
KELURAHAN GUYANGAN					**703.459.981**
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	89	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	219.451.868
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	349.654.551
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	134.353.562
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	90	-	-

3.3.1.Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2025, yaitu **"Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi, dengan prioritas pembangunan tahun 2025 sebagai berikut :

1) Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri.
2) Mendorong Berkembangnya Sektor Strategis Usaha Mikro, Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
3) Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan, Pendidikan Berkarakter
4) Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
5) Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian
6) Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Dan Digitalisasi Pelayanan Publik
7) Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BAGOR KAB. NGANJUK
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN BAGOR						**4.682.862.111,00**							**4.813.121.150,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.682.862.111,00**							**4.813.121.150,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.682.862.111,00**							**4.813.121.150,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Kecamatan***	**80 Nilai**			**80 Nilai**	**4.154.084.111,00**						**80 Nilai**	**4.239.726.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tlisusun*	2 Dokumen			2 Dokumen	8.668.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	2 Dokumen	3.384.500,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			4 Laporan	8.668.000,00	Kab, Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	4 Laporan	3.384.500,00	KECAMATAN BAGOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	3 Dokumen			3 Dokumen	3.215.023.931,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	3 Dokumen	3.601.635.500,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan			24 Orang/bulan	3.209.187.931,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	24 Orang/bulan	3.590.751.000,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	2.918.000,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	1 Laporan	3.384.500,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semsateran SKPD	6 Laporan			6 Laporan	2.918.000,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	6 Laporan	7.500.000,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	2 Dokumen			2 Dokumen	88.589.138,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kec. Bagor	2 Dokumen	27.540.000,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket			1 Paket	20.940.738,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kec. Bagor	1 Paket	15.900.000,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	89,779,700.00	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	1 Paket	67,900,000.00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	11,500,000.00	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	1 Paket	9,600,000.00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			1 Dokumen	2,400,000.00	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	1 Dokumen	2,400,000.00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang			25 Orang	67.648.400,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kec. Bagor	25 Orang	12.540.000,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	6 Dokumen			6 Dokumen	153.386.300,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	6 Dokumen	148.000.000,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	5.111.600,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	1 Paket	4.900.000,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan			6 Laporan	43,595,000.00	Kab, Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab, Nganjuk	6 Laporan	45,000,000.00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	1,000,000.00	Kab, Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab, Nganjuk	1 Dokumen	20,000,000.00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan*	55 Unit			55 Unit	308,393,742.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kec, Bagor	55 Unit	160,000,000.00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit			50 Unit	107.653.450,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kec. Bagor	50 Unit	60.000.000,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit			5 Unit	134.129.292,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kec. Bagor	5 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	66.711.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kec. Bagor		50.000.000,00	KECAMATAN BAGOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	13 Laporan			1 Laporan	205,396,000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	13 Laporan	175,916,000,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			12 Laporan	3,000,000,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	1 Laporan	3,000,000,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	51,028,000,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	12 Laporan	42,200,000,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			6 Laporan	151.368.000,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	12 Laporan	129.816.000,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Terlaksannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	47 Unit			47 Unit	174.627.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	47 Unit	124.150.000,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakhya				8 Unit	63.746.500,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk		64.000.000,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit			18 Unit	14.750.000,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	18 Unit	14.750.000,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			20 Unit	24.960.000,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	20 Unit	25.000.000,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	71.170.500,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	1 Unit	20.400.000,00	KECAMATAN BAGOR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib***	**95 %**			**95 %**	**135.475.000,00**						**95 %**	**85.487.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	6 Laporan			6 Laporan	52.375.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	6 Laporan	45.487.500,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan			6 Laporan	52.375.000,00	Kab, Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab, Nganjuk	6 Laporan	45.487.500,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	4 Dokumen			4 Dokumen	19.800.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab, Nganjuk	4 Dokumen	20.000.000,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen			4 Dokumen	19.800.000,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	4 Dokumen	20.000.000,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan			12 Laporan	63.300.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	12 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan			12 Laporan	63.300.000,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	12 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN BAGOR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BAGOR***	**95 %**			**95 %**	**118.925.000,00**						**95 %**	**170.824.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam pembangunan di Kecamatan*	21 Lembaga Kemasyarakatan			21 Lembaga Kemasyarakatan	118.925.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	21 Lembaga Kemasyarakatan	170.824.500,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21 Lembaga Kemasyarakatan			21 Lembaga Kemasyarakatan	19.675.000,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	21 Lembaga Kemasyarakatan	26.841.000,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6 Dokumen			6 Dokumen	99.250.000,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	6 Dokumen	143.983.500,00	KECAMATAN BAGOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase permasalahan trantibum yang dikoordinasikan penanganannya dengan Forkopimcam serta Toga/Tomas***	**95 %**			**95 %**	**62.725.000,00**						**95 %**	**90.397.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	4 Laporan			4 Laporan	62.725.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	4 Laporan	90.397.000,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan			4 Laporan	62.725.000,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	4 Laporan	90.397.000,00	KECAMATAN BAGOR
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang Aktif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan***	**95 %**			**95 %**	**133.583.000,00**						**95 %**	**108.701.250,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan*	21 Lembaga Kemasyarakatan			21 Lembaga Kemasyarakatan	133.583.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	21 Lembaga Kemasyarakatan	108.701.250,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21 Orang			21 Orang	133.583.000,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	21 Orang	108.701.250,00	KECAMATAN BAGOR
6.	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase desa cepat berkembang***	**95 %**			**95 %**	**78.070.000,00**						**95 %**	**117.984.900,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang*	21 Desa/Kelurahan			21 Desa/Kelurahan	78.070.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	21 Desa/Kelurahan	117.984.900,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21 Dokumen			21 Dokumen	40.770.000,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	21 Dokumen	95.000.000,00	KECAMATAN BAGOR
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	21 Dokumen			21 Dokumen	37.300.000,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	21 Dokumen	22.984.900,00	KECAMATAN BAGOR
		KELURAHAN KEDONDONG						**703.068.061,00**							**599.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**703.068.061,00**							**599.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**703.068.061,00**							**599.500.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Kecamatan***	**80 Nilai**			**80 Nilai**	**191.697.718,00**						**80 Nilai**	**141.870.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	3 Dokumen			3 Dokumen	23,265,000.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelonggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	3 Dokumen	19,650,000.00	KELURAHAN KEDONDONG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	23,265,000.00	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	1 Dokumen	19,650,000.00	KELURAHAN KEDONDONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	6 Dokumen			6 Dokumen	42,490,700.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	6 Dokumen	34,573,750.00	KELURAHAN KEDONDONG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	1,093,500.00	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	1 Paket	785,000.00	KELURAHAN KEDONDONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	32,869,700.00	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	1 Paket	30,414,750.00	KELURAHAN KEDONDONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	5,507,500.00	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	1 Paket	974,000.00	KELURAHAN KEDONDONG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	1 Dokumen	2.400.000,00	KELURAHAN KEDONDONG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan*	55 Unit			55 Unit	23.759.218,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	55 Unit	1.144.521,00	KELURAHAN KEDONDONG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit			2 Unit	23.759.218,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	5 Unit	1.144.521,00	KELURAHAN KEDONDONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	13 Laporan			13 Laporan	80.178.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	13 Laporan	68.538.000,00	KELURAHAN KEDONDONG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			3 Laporan	3.630.000,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	12 Laporan	3.630.000,00	KELURAHAN KEDONDONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			1 Laporan	76.548.000,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	12 Laporan	64.908.000,00	KELURAHAN KEDONDONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Terlaksannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	47 Unit			47 Unit	22.004.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	47 Unit	17.963.729,00	KELURAHAN KEDONDONG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit			3 Unit	7.204.800,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	5 Unit	7.823.800,00	KELURAHAN KEDONDONG
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit			1 Unit	1.800.000,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	18 Unit	1.800.000,00	KELURAHAN KEDONDONG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			4 Unit	3.000.000,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	20 Unit	1.200.000,00	KELURAHAN KEDONDONG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	1 Unit	7.139.928,00	KELURAHAN KEDONDONG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BAGOR***	**95 %**			**95 %**	**359.990.780,00**						**95 %**	**350.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam pembangunan di Kecamatan*	-			21 Lembaga Masyarakat	359.990.780,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	-	350.000.000,00	KELURAHAN KEDONDONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	331.785.290,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk		300.000.000,00	KELURAHAN KEDONDONG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	28.205.500,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk		50.000.000,00	KELURAHAN KEDONDONG
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Desa Cepat Berkembang***	**95 %**			**95 %**	**151.379.553,00**						**95 %**	**107.630.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang*	21 Desa/Kelurahan			21 Desa/Kelurahan	151.379.553,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	21 Desa/Kelurahan	107.630.000,00	KELURAHAN KEDONDONG
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen			1 Dokumen	151.379.553,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	1 Dokumen	107.630.000,00	KELURAHAN KEDONDONG
		KELURAHAN GUYANGAN						**703.459.981,00**							**609.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**703.459.981,00**							**609.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**703.459.981,00**							**609.500.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Kecamatan***	**80 Nilai**			**80 Nilai**	**219.451.868,00**						**80 Nilai**	**159.597.500,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	3 Dokumen			3 Dokumen	23.265.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	kab. Nganjuk	3 Dokumen	20.715.000,00	KELURAHAN GUYANGAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	23.265.000,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	kab. Nganjuk	1 Dokumen	20.715.000,00	KELURAHAN GUYANGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	6 Dokumen			6 Dokumen	42.480.900,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	5 Dokumen	36.625.800,00	KELURAHAN GUYANGAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	1.993.500,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	1 Paket	1.375.000,00	KELURAHAN GUYANGAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			1 Laporan	16,000,000.00	Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	12 Laporan	3,240,000.00	KELURAHAN GUYANGAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			1 Laporan	76,548,000.00	Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	12 Laporan	64,908,000.00	KELURAHAN GUYANGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara*	47 Unit			47 Unit	25,804,800.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	47 Unit	24,108,700.00	KELURAHAN GUYANGAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit			1 Unit	7,204,800.00	Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	8 Unit	7,823,800.00	KELURAHAN GUYANGAN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit			1 Unit	1,500,000.00	Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	18 Unit	1,800,000.00	KELURAHAN GUYANGAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			1 Unit	2,100,000.00	Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	20 Unit	1,400,000.00	KELURAHAN GUYANGAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	15.000.000,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	1 Unit	13.284.900,00	KELURAHAN GUYANGAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BAGOR***	**95 %**			**95 %**	**349.654.551,00**						**95 %**	**350.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam pembangunan di Kecamatan*	-			21 Lembaga Masyarakat	349.654.551,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	-	350.000.000,00	KELURAHAN GUYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	321.536.151,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk		300.000.000,00	KELURAHAN GUYANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Poknas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Poknas / Ormas	28.118.400,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk		50.000.000,00	KELURAHAN GUYANGAN
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Desa Cepat Berkembang***	**95 %**			**95 %**	**134.353.562,00**						**95 %**	**99.902.500,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang*	21 Desa/Kelurahan			21 Desa/Kelurahan	134.353.562,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	21 Desa/Kelurahan	99.902.500,00	KELURAHAN GUYANGAN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen			1 Dokumen	134.353.562,00	Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	1 Dokumen	99.902.500,00	KELURAHAN GUYANGAN
	JUMLAH							**6.089.390.153,00**							**6.022.121.150,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025. Tema RKPD 2025 **"Peningkatan Produktivisitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural".** Prioritas RKPD 2025

8. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berbasis sector potensial Pertanian, dan pengembangan perdagangan- industry yang diprioritaskan berbahan baku hasil pertanian) ➔ Regulasi dan sarpras pendukung ekonomi (Reformasi Struktural);
9. Mendorong Berkembangnya Sektor Strategis (Usaha Mikro, Koperasi, Industri Kreatif, Pariwisata dll)
10. Pemantapan SDM Berdayasaing melalui peningkatan akses dan kualitas kesehatan, Pendidikan Berkarakter.
11. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran serta pemenuhan kebutuhan social dasar.
12. Pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata pendorong konektivitas antar wilayah dan aktivitas perekonomian.
13. Tatakelola Pemerintah yang bersih dan inovasi dan digitalisasi Pelayanan Publik
14. Nilai-nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman dan keamanan sebagai pendukung investasi daerah.

Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

Tabel 4.1

Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2025)
1.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Rp6.089.390.153,-

Tabel 4.2
Sasaran Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2025)	Alokasi (2025)	
				Program	Pagu Indikatif
KECAMATAN					**4.682.862.111**
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	89	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.154.084.111
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	135.475.000
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	118.925.000
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	78.070.000
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	90	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	62.725.000
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	133.583.000

Tabel 4.2.1
Sasaran Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2025)	Alokasi (2025)	
				Program	Pagu Indikatif
KELURAHAN KEDONDONG					**703.068.061**
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	89	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	191.697.718
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	359.990.790
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	151.379.553
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	90	-	-

Tabel 4.2.2
Sasaran Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2025)	Alokasi (2025)	
				Program	Pagu Indikatif
KELURAHAN GUYANGAN					**703.459.981**
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	89	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	219.451.868
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	349.654.551
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	134.353.562
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	90	-	-

Tabel 4.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025
Kecamatan Bagor

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi
		Uraian (Output)	Target		
KECAMATAN				**6.089.390.153**	**BAGOR**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI SAKIP KECAMATAN**	**80 Nilai**	**4.154.084.111**	**Kec Bagor**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**4 Dokumen**	**8.668.000**	**Kec Bagor**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	8.668.000	Kec Bagor
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3 Dokumen**	**3.215.023.931**	**Kec Bagor**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang	3.209.187.931	Kec Bagor
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.918.000	Kec Bagor
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	2.918.000	Kec Bagor
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**88.589.138**	**Kec Bagor**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket	20.940.738	Kec Bagor
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	67.648.400	Kec Bagor
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6 Dokumen**	**153.386.300**	**Kec Bagor**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.111.600	Kec Bagor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	89.779.700	Kec Bagor
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.500.000	Kec Bagor
	Penyediaan Bahan Bacaaan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	2.400.000	Kec Bagor

	dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
	Penyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	43.595.000	Kec Bagor
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Kec Bagor
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**55 Unit**	**308.393.742**	**Kec Bagor**
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	50 Unit	107.553.450	Kec Bagor
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	5 Unit	134.129.292	Kec Bagor
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	66.711.000	Kec Bagor
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**13 Laporan**	**205.396.000**	**Kec Bagor**
	Penyediaan Jasa SUrat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	Kec Bagor
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	51.028.000	Kec Bagor
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	151.368.000	Kec Bagor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**47 Unit**	**174.627.000**	**Kec Bagor**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	63.746.500	Kec Bagor
	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit	14.750.000	Kec Bagor
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	20 Unit	24.960.000	Kec Bagor
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya YangDipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	71.170.500	Kec Bagor
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN DENGAN TERTIB**	**95 %**	**135.475.000**	**Kec Bagor**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**6 Laporan**	**52.375.000**	**Kec Bagor**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	6 Laporan	52.375.000	Kec Bagor

	Instansi Vertikal Terkait	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**4 Dokumen**	**19.800.000**	**Kec Bagor**
	Koordinasi / Sinergi Dengan perangkat daerah dan / Instansi Vertikal yang terkait dala pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	19.800.000	Kec Bagor
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	**12 Laporan**	**63.300.000**	**Kec Bagor**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	63.300.000	Kec Bagor
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BAGOR**	**95%**	**118.925.000**	**Kec Bagor**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan**	**95%**	**118.925.000**	**Kec Bagor**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19 Lembaga Kemasyarakat	19.675.000	Kec Bagor
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6 Dokumen	99.250.000	Kec Bagor
4	**PROGRAM KOORDINASI KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE PERMASALAHAN TRANTIBUM YANG DIKOORDINASIKAN PENANGANANNYA DENGAN FORKOPIMCAM SERTA TOGA/TOMAS**	**95%**	**62.725.000**	**Kec Bagor**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**4 Laporan**	**62.725.000**	**Kec Bagor**
	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	62.725.000	Kec Bagor
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE LEMBAGA/ORGANISASI MASYARAKAT YANG AKTIF DALAM PENYELENGGARAAN**	**21Orang**	**133.583.000**	**Kec Bagor**

		PEMERINTAHAN DI KECAMATAN			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**	**21 Lembaga/ Organisasi**	**133.583.000**	**Kec Bagor**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21Orang	133.583.000	Kec Bagor
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG**	**95 %**	**78.070.000**	**Kec Bagor**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**21 Desa/Kelurahan**	**78.070.000**	**Kec Bagor**
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21 Dokumen	40.770.000	Kec Bagor
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegitan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	19 Dokumen	37.300.000	Kec Bagor

Tabel 4.3.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025
Kelurahan Kedondong

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi
		Uraian (Output)	Target		
KELURAHAN KEDONDONG				**703.068.061**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI SAKIP KECAMATAN**	**80 Nilai**	**191.697.718**	**Kec Bagor**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3 Dokumen**	**23.265.000**	**Kec Bagor**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Ppengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	23.265.000	Kedondong
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6 Dokumen**	**42.490.700**	**Kec Bagor**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.093.500	Kedondong
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.889.700	Kedondong
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.507.500	Kedondong
	Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000	Kedondong
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**55 Unit**	**23.759.218**	**Kec Bagor**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	5 Unit	23.759.218	Kedondong
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**13 Laporan**	**80.178.000**	**Kec Bagor**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.630.000	Kedondong
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	76.548.000	Kedondong
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**47 Unit**	**22.004.800**	**Kec Bagor**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	7.204.800	Kedondong
	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit	1.800.000	Kedondong
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	20 Unit	3.000.000	Kedondong
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	10.000.000	Kedondong

	Bangunan Lainnya	YangDipelihara/Direhabilitasi			
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BAGOR**	**95%**	**359.990.790**	**Kec Bagor**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan**	**95%**	**359.990.790**	**Kelurahan**
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Telaksannya pembangunan sarana dan prasarana	1 Unit	331.785.290	Kedondong
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksannya Pemberdayaan Masryarakat	1 Pokmas/Ormas	28.205.500	Kedondong
3	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG**	**95 %**	**151.379.553**	**Kec Bagor**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**21 Desa/Kelurahan**	**151.379.553**	**Kec Bagor**
	Fasilitasi pelaksanaan tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi pelaksanaan tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	151.379.553	Kedondong

Tabel 4.3.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025
Kelurahan Guyangan

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi
		Uraian (Output)	Target		
KELURAHAN GUYANGAN				**703.459.981**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI SAKIP KECAMATAN**	**80 Nilai**	**219.451.868**	**Kec Bagor**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3 Dokumen**	**23.265.000**	**Kec Bagor**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Ppengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	23.265.000	Guyangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6 Dokumen**	**42.480.900**	**Kec Bagor**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.093.500	Guyangan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.879.900	Guyangan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.507.500	Guyangan
	Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000	Guyangan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**55 Unit**	**35.353.168**	**Kec Bagor**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	5 Unit	35.353.168	Guyangan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**13 Laporan**	**92.548.000**	**Kec Bagor**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.000.000	Guyangan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	76.548.000	Guyangan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**47 Unit**	**25.804.800**	**Kec Bagor**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	7.204.800	Guyangan
	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit	1.500.000	Guyangan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	20 Unit	2.100.000	Guyangan

	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya YangDipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	Guyangan
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BAGOR**	**95%**	**349.654.551**	**Kec Bagor**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan**	**95%**	**349.654.551**	**Kelurahan**
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Telaksannya pembangunan sarana dan prasarana	1 Unit	321.536.151	Guyangan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksannya Pemberdayaan Masryarakat	1 Pokmas/Ormas	28.118.400	Guyangan
3	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG**	**95 %**	**134.454.562**	**Kec Bagor**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**21 Desa/Kelurahan**	**134.454.562**	**Kec Bagor**
	Fasilitasi pelaksanaan tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi pelaksanaan tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	134.454.562	Guyangan

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Kecamatan Bagor sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bagor dimaksud dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Kecamatan Bagor dengan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD), sebagai implementasi sasaran strategis rencana pembangunan daerah (RPD) dan Renstra Kecamatan Bagor yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. Melaksanakan Rencana Kerja Kecamatan Bagor Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
   b. Melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Kecamatan Bagor untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Kecamatan Bagor ; dan
   c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Kecamatan Bagor dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Rencana Kerja Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Kecamatan Bagor dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUPRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

